

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abdul Latif. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada Rajawali Pers. Depok.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah*. PT Raja Grafindo Persada Rajawali Pers. Jakarta.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press. Malang.
- Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia. 2019. *Penjabat Kepala Daerah*. Thafa Media. Yogyakarta.
- H.A.W. Widjaja. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- HM Arief Muljadi. 2005. *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*. Prestasi Pusaka. Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, et al. 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Setara Press. Malang.

- I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji. 2007. Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana. Diadit Media. Jakarta.
- Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- J.Kaloh. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Majda El. Muhtaj. 2007. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Martin Jimung. 2005. Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah. Pustaka Nusantara. Yogyakarta. (cetakan ke-1, sampul merah orang)
- Muhtar Said. 2019. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara. Thafa Media. Yogyakarta.
- Mustamin Dg. Mattutu, et al. 2004. Mandat, Delegasi Atribusi, dan Implementasinya Di Indonesia. Tim UII Press. Yogyakarta.
- Ni'Matul Huda. 2010. Hukum Tata Negara Indonesia. Rajawali Press. Jakarta.
- . 2017. Hukum Pemerintahan Daerah. Nusa Media. Bandung.
- Nomensen Sinamo. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Nurul Qamar. 2010. Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, et al. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- . 2010. Hukum Administrasi dan Good Governance. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Ridwan HR. 2017. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada Rajawali Pers. Jakarta.

- Rusdianto Sesung. 2013. Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sadjijono. 2011. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2011. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Raja Grafindo Persada Rajawaali Pers. Jakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. Gubernur, Kedudukan, Peran dan Kewenangannya. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Syahrudin Nawi. 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. Pengantar Hukum Indonesia Dari Tradisi Ke Konstitusi. CV Pustaka Setia. Bandung.

#### **JURNAL :**

- Agustin Widjiastuti. "Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN". Perspektif. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta. Vol. 22. Nomor 2 Mei 2017.
- Akhmad Marwi. "Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)". Jurnal Hukum dan Keadilan IUS, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol. IV. Nomor 3 Desember 2016.
- Aristoni. "Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Welfare State Perspektid Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam". Jurnal Penelitian. Lembaga Kajian Sosial dan Agama Tasamuh Institute. Vol. 8. Nomor 2 Agustus 2014.
- Fabian Riza Kurnia dan Rizari. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Pertahana". TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan. IPDN Sumatera Barat. Vol. 11. Nomor 2 2019.

- Lia Ni'matul Maula, Putra Astomo, dan Dian Fitri Sabrina. "Legalitas Penetapan Penjabat Walikota Makassar Sebagai Dampak Dari Pemilihan Kepala Daerah 2018". Jurnal Hukum Unsulbar. Universitas Sulawesi Barat. Vol. 1. Nomor 1 Januari 2017
- Septi Nur Wijayanti. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". Jurnal Media Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 23. Nomor 2 Desember 2016.
- Subadi dan Tiara Oliviarizky Toersina. "Perkembangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi Di Daerah". Mimbar Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 30. Nomor 1 Februari 2018.
- Suroto. "Macam-Macam Konsep Negara Hukum (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)". Jurnal Konstitusi. PKK UII Yogyakarta. Vol. 1. Nomor 1 November 2012.

#### **BERITA PADA SURAT KABAR ONLINE :**

- <https://news.detik.com/berita/d-5013083/gubernur-sulsel-lantik-yusran-jadi-pj-walkot-makassar?single=1>
- <https://makassar.tribunnews.com/2020/06/25/ini-kebijakan-yusran-jusuf-selama-44-hari-pimpin-makassar>
- <https://pengajar.co.id/implikasi-adalah>
- <https://makassar.tribunnews.com/2020/06/26/pj-wali-kota-makassar-diganti-dosen-unm-akan-menimbulkan-kecurigaan-politis>,
- <https://www.negarahukum.com/walikota-makassar-diganti-lagi.html>,

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.